



KATALOG : 9205.3174

PENDAPATAN REGIONAL JAKARTA BARAT
Regional Income of Jakarta Barat
2003-2006

<https://jakbarkota.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik
Kotamadya Jakarta Barat**

PENDAPATAN REGIONAL JAKARTA BARAT 2003-2006

ISSN : 1829-7153
NO. PUBLIKASI : 31740.0702
KATALOG BPS : 9205.3174

Naskah :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh :
BPS Kotamadya Jakarta Barat

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
May be cited with reference to the source

Kata Pengantar

Pendapatan Regional Jakarta Barat 2003–2006 merupakan publikasi yang secara series diterbitkan oleh BPS Kotamadya Jakarta Barat. Publikasi ini memuat hasil penghitungan pendapatan regional Kotamadya Jakarta Barat menurut lapangan usaha, baik atas dasar harga konstan 2000 maupun atas dasar harga berlaku yang disajikan dalam nilai rupiah maupun berupa indeks dan distribusi persentase.

Disadari bahwa hasil penghitungan ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif guna peningkatan kualitas publikasi ini sangat kami harapkan.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terbitnya publikasi ini. Mudah-mudahan buku ini banyak memberikan manfaat bagi para pembacanya, terima kasih.

Jakarta, September 2007

BPS Kotamadya Jakarta Barat
Kepala,

Danang Satria, MA
NIP. 340010076

Preface

The 2002 – 2006 Regional Income of Jakarta Barat is a serial publication by BPS Statistics of Jakarta Barat Municipality. This publication presents the results of calculation regional income of the Jakarta Barat municipality, based at current market prices and at 2000 constant prices in rupiahs and percentages. This publication is based on 2000.

This publication still needs improvement particularly due to the incompleteness of data required for calculation. Every effort will be done to meet the purpose. Contributions and great assistances from those who involved during preparation of this publication are gratefully acknowledged.

Finally, we are looking forward comments and suggestions for improving similar publication in future.

Jakarta, September 2007

BPS Statistics
Jakarta Barat Municipality
Head,

Danang Satria, MA
NIP. 340010076

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
PREFACE	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL ANALISIS	vii
LAMPIRAN TABEL POKOK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. KONSEP DAN DEFINISI	
1.1. Umum.....	1
1.2. Statistik Pendapatan Regional	4
1.2.1. Arti dan Kegunaan	4
1.2.2. Siklus kegiatan ekonomi	5
1.2.3. Pengertian Pendapatan Regional.....	6
a. PDRB Atas Dasar Harga Pasar	6
b. PDRN Atas Dasar Harga Pasar.....	7
c. PDRN Atas Dasar Biaya Faktor	7
d. Produk Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor	7
e. Pendapatan Regional Perkapita.....	8
1.3. Metode Penghitungan Pendapatan Regional	9
a. Pendekatan Produksi (<i>Production Approach</i>)	9
b. Pendekatan Pendapatan (<i>Income Approach</i>)	10
c. Pendekatan Pengeluaran (<i>Expenditure Approach</i>)	10
d. Metode Alokasi (<i>Allocation Approach</i>)	11

1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks.....	11
1.5. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan.....	13
a. Revaluasi	14
b. Ekstrapolasi	14
c. Deflasi	15
1.6. Masalah dan Keterbatasan	15

BAB II. URAIAN SEKTORAL

2.1. SEKTOR PERTANIAN	19
2.1.1. Tanaman Bahan Makanan	19
2.1.2. Tanaman Lainnya	20
2.1.3. Peternakan dan Hasil-hasilnya.....	21
2.1.4. Perikanan	22
2.2. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN.....	22
2.3. SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH.....	24
2.3.1. Listrik.....	24
2.3.2. Gas	25
2.3.3. Air Bersih.....	25
2.4. SEKTOR BANGUNAN	26
2.5. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN	26
2.5.1. Perdagangan Besar dan Eceran	26
2.5.2. Hotel.....	27
2.5.3. Restoran.....	28
2.6. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMU- NIKASI.....	28
2.6.1. Pengangkutan.....	29
a. Angkutan Rel.....	29
b. Angkutan Jalan Raya.....	29
c. Angkutan Laut.....	30
d. Angkutan Udara.....	30
e. Jasa Penunjang Angkutan.....	30

2.6.2. Komunikasi.....	31
a. Pos dan Giro.....	31
b. Telekomunikasi.....	32
c. Jasa Penunjang Komunikasi.....	32
2.7. SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN, DAN PERUSAHAAN.....	33
2.7.1. Bank	33
2.7.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	33
2.7.3. Jasa Penunjang Keuangan.....	34
2.7.4. Sewa Bangunan.....	34
2.7.5. Jasa Perusahaan.....	35
2.8. SEKTOR JASA-JASA.....	36
2.8.1. Pemerintahan Umum.....	36
2.8.2. Jasa-jasa swasta.....	38
a. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan ...	38
b. Jasa Hiburan dan Kebudayaan.....	39
c. Jasa Perorangan dan Rumahtangga	40

BAB III. TINJAUAN EKONOMI

3.1. Pertumbuhan Ekonomi	43
3.2. Struktur Ekonomi	50
3.3. PDRB Perkapita	57
3.4. Inflasi/Deflasi	59

BAB IV. PERBANDINGAN PDRB ANTAR WILAYAH

4.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	61
4.2. Kontribusi PDRB.....	65
4.3. PDRB Perkapita	68

BAB I

KONSEP DAN DEFINISI

1.1. UMUM

Pengertian pembangunan nasional adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, serta meningkatkan hubungan ekonomi regional, sehingga kegiatan ekonomi yang selama ini didominasi sektor primer bergeser ke sektor sekunder dan tersier. Dalam menyusun perencanaan pembangunan suatu wilayah diperlukan berbagai macam data statistik, demikian pula dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Salah satu tolok ukur yang biasanya dipakai dalam kegiatan tersebut adalah data statistik pendapatan regional melalui penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku setiap tahun,

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk wilayah Jakarta Barat sudah dimulai sejak tahun 1986 dengan menggunakan tahun dasar 1983, untuk tahun 1994-1999 menggunakan tahun dasar 1993, sedangkan mulai tahun 2000 sampai saat ini menggunakan tahun dasar baru yaitu tahun dasar 2000.

Beberapa hal yang mendorong dilakukannya pergeseran tahun dasar dalam penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 1993 menjadi atas dasar harga konstan 2000 adalah :

- a. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 menjadi tidak realistis lagi akibat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 karena anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan (1997-1999).
- b. Terjadi pergeseran struktur ekonomi antara periode sebelum krisis ekonomi dengan periode pasca krisis. Krisis tersebut telah mendorong ke arah pergeseran struktur perekonomian nasional yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

- c. Pergeseran tahun dasar dalam penghitungan PDRB merupakan suatu hal yang secara reguler dilakukan oleh semua negara di dunia yang menyusun PDRB-nya berdasarkan “*The System of National Accounts (SNA) 1993*” yang direkomendasikan oleh badan dunia PBB untuk menjadi pegangan bagi semua negara anggotanya.

Selain ketiga alasan teknis diatas, Badan Pusat Statistik (BPS) memilih tahun 2000 menjadi tahun dasar baru karena pada tahun 2000 perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan setelah era krisis moneter yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia lainnya.

Disamping itu, kondisi Sosial Ekonomi Indonesia termasuk Jakarta Barat pada tahun 2000 menunjukkan keadaan yang relatif lebih baik dan stabil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Hal-hal lain yang menjadi alasan bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memilih tahun 2000 karena pada tahun 2000 telah dilakukan upaya penyempurnaan kelengkapan dan konsistensi data statistik yang merupakan dasar dalam penyusunan tabel-tabel PDRB melalui penyusunan tabel Input-Output 2000.

1.2. Statistik Pendapatan Regional

1.2.1. Arti dan Kegunaan

Perencanaan ekonomi umumnya mempermasalahkan dua hal pokok, yaitu :

- a. Bagaimana mengusahakan agar pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara *significant* dan mantap.
- b. Bagaimana mengarahkan agar pendapatan yang timbul tersebut dapat dinikmati masyarakat secara adil dan merata.

Untuk menjawab pertanyaan itu, secara kuantitatif statistik pendapatan regional dapat dipakai sebagai salah satu ukuran dan landasan yang tepat dalam perencanaan ekonomi tersebut. Statistik pendapatan regional adalah data kuantitatif yang menggambarkan besarnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah (*region*) dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Manfaat statistik pendapatan regional antara lain :

- a. Mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi regional, baik secara menyeluruh maupun sektoral.
- b. Mengetahui gambaran struktur perekonomian suatu daerah.

- c. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu daerah, baik tingkat pertumbuhannya maupun tingkat kemakmurannya.
- d. Mengetahui tingkat inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu daerah.
- e. Mengetahui potensi suatu daerah terhadap nasional baik keseluruhan maupun sektoral.

1.2.2. Siklus kegiatan ekonomi

Secara sederhana, transaksi ekonomi yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat terdiri dari kelompok yang memproduksi barang dan jasa, serta kelompok yang mengkonsumsi. Untuk menghasilkan barang dan jasa, kelompok produsen memerlukan faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal, wiraswasta) yang berasal dari konsumen (rumah tangga). Pihak konsumen akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhannya.

Siklus tersebut dapat dijelaskan dalam Diagram 1 sebagai berikut :

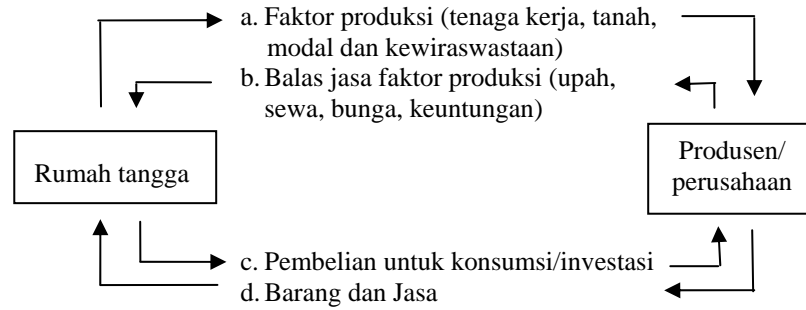


Diagram 1.

1.2.3 Pengertian Pendapatan Regional

Sebelum sampai kepada pengertian sesungguhnya dari pendapatan regional, sebaiknya perlu dijelaskan secara rinci agregat-agregat dari pendapatan regional yaitu sebagai berikut :

a. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Pasar**

Adalah nilai (produk) barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam satu periode tertentu. Nilai tersebut sebenarnya adalah balas jasa dari faktor produksi yang ikut serta dalam produksi yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan

penyusutan dan pajak tidak langsung netto. Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan pajak tidak langsung netto tersebut dalam pengertian sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto, sehingga PDRB atas dasar harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari sektor kegiatan ekonomi setelah dikurangi dengan biaya antara.

b. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Atas Dasar Harga Pasar

Perbedaan konsep netto disini dan konsep bruto pada rincian (a) adalah karena faktor penyusutan. Dalam PDRN atas dasar harga pasar, komponen penyusutan telah dikeluarkan.

c. Produk Domestik Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan konsep biaya faktor disini dan konsep harga pasar pada rincian (b) adalah dalam PDRN atas dasar biaya faktor, pajak tidak langsung netto telah dikeluarkan.

d. Produk Regional Netto Atas Dasar Biaya Faktor

Perbedaan dengan konsep pada rincian (c) diatas adalah masalah domestiknya. Disebut produk domestik regional karena nilai tambah yang dihitung adalah seluruh nilai

tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah tanpa memperhatikan pemilikan atas produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut atau milik penduduk wilayah lain. Sedangkan pada rincian (d), yaitu produk regional yang merupakan nilai tambah dari faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut, baik yang beroperasi di dalam wilayah bersangkutan maupun yang beroperasi di luar wilayah. Oleh karena itu untuk sampai kepada produk regional, pendapatan atas faktor produksi milik penduduk wilayah lain harus dikeluarkan dan sebaliknya pendapatan atas faktor produksi milik penduduk yang bersangkutan yang berasal dari luar wilayah harus dimasukkan, yang selisihnya disebut sebagai faktor pendapatan netto dari luar wilayah. Jadi produk regional netto atas dasar biaya faktor merupakan produk domestik regional netto ditambah faktor pendapatan netto dari luar wilayah. Pengertian inilah yang sebenarnya merupakan pendapatan regional.

e. Pendapatan Regional Per Kapita

Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan regional per kapita.

Angka pendapatan regional per kapita ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Untuk perbandingan secara internasional, dapat digunakan satuan mata uang dolar Amerika (US \$).

1.3. Metode Penghitungan Pendapatan Regional

Penghitungan pendapatan regional dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan (*approach*) :

a. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan ini diperoleh dari nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara. *Output* merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan produksi dalam satu periode tertentu, sedangkan biaya antara adalah barang dan jasa yang digunakan dalam proses kegiatan produksi yang sedang berjalan dimana barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang biasanya habis sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan yang kurang dari satu tahun. Pengeluaran atas balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta penyusutan dan pajak tidak langsung

netto bukan merupakan biaya antara. Demikian juga pengeluaran untuk pembelian/pembuatan barang-barang modal perusahaan bukan merupakan biaya antara.

b. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Penghitungan nilai tambah dengan pendekatan ini diperoleh dari penjumlahan komponen-komponen nilai tambah itu sendiri. Seperti telah dijelaskan, nilai tambah bruto merupakan penjumlahan dari balas jasa faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung netto.

c. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Penghitungan melalui pendekatan ini dilakukan langsung terhadap pendapatan regional, yaitu dengan menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok dan ekspor netto (ekspor dikurangi impor). Kalau data yang digunakan untuk menghitung pendapatan regional dengan ketiga ini cukup konsisten, maka hasil estimasinya tentu

tidak jauh berbeda. Selain ketiga pendekatan di atas, masih ada satu metode lagi yang kadang-kadang digunakan, terutama kalau tidak ada data sama sekali yaitu metode alokasi.

d. Metode Alokasi (*Allocation Approach*)

Metode ini merupakan metode pendekatan tidak langsung. Penghitungan nilai tambah dengan metode ini diperoleh dengan mengalokasikan nilai tambah nasional untuk provinsi tersebut, dan nilai tambah provinsi untuk kabupaten/kotamadya berdasarkan suatu indikator sebagai alokatornya.

1.4. Cara Penyajian dan Angka Indeks

Agregat-agregat pendapatan seperti yang telah diuraikan di atas, secara series dapat disajikan dalam dua bentuk dasar yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan suatu tahun dasar.

- a. Penyajian atas dasar harga berlaku meliputi semua agregat pendapatan atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahunnya, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara maupun pada penilaian komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran produk domestik regional bruto.

- b. Pada penyajian atas dasar harga konstan suatu tahun dasar, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap, maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil dan bukan fluktuasi kenaikan harga.

Agregat-agregat pendapatan juga disajikan dalam bentuk angka indeks yaitu indeks perkembangan, laju pertumbuhan dan indeks implisit, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Perkembangan, diperoleh dengan membagi nilai-nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun dasar dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun terhadap tahun dasarnya.
2. Angka Laju Pertumbuhan, diperoleh dengan membagi nilai pada masing-masing tahun dengan nilai pada tahun sebelumnya dikalikan 100, kemudian dikurangi dengan 100. Angka ini menunjukkan tingkat

perkembangan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Indeks Harga Implisit, diperoleh dengan membagi nilai atas dasar harga berlaku dengan nilai atas dasar harga konstan untuk masing-masing tahunnya dikalikan 100. Indeks ini menunjukkan tingkat perkembangan harga dari agregat pendapatan terhadap harga pada tahun dasar. Selanjutnya bila dari indeks implisit ini dibuatkan indeks berantainya, akan terlihat tingkat perkembangan harga setiap tahun terhadap tahun sebelumnya.

1.5. Pendapatan Regional Atas Dasar Harga Konstan

Seperti telah diketahui bahwa angka-angka pendapatan atas dasar harga konstan adalah sangat penting untuk melihat pertumbuhan riil dari tahun ke tahun bagi setiap agregat ekonomi. Agregat ekonomi yang dimaksud adalah Produk Domestik Regional Bruto, Produk Regional Bruto dan Pendapatan Regional.

Pertumbuhan riil dari agregat ekonomi diturunkan dengan cara menghilangkan pengaruh dari perubahan harga pada angka atas dasar harga berlaku, sehingga terbentuk angka atas dasar harga konstan. Bila angka atas dasar harga

konstan dari agregat-agregat ekonomi yang berbeda dinyatakan dalam harga tahun dasar yang sama, maka analisis perbandingan akan mungkin dilakukan dan seluruh agregat tersebut dapat diturunkan dari komponen-komponennya.

Tiga metode dasar berikut adalah untuk merubah angka atas dasar harga berlaku menjadi angka atas dasar harga konstan. Metode-metode tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk seluruh komponen PDRB seperti permintaan akhir, output, input antara dan komponen pendapatan dari nilai tambah.

a. Revaluasi

Metode ini dilakukan dengan cara menilai produksi masing-masing tahun dengan menggunakan harga tahun dasar.

b. Ekstrapolasi

Metode ini dilakukan dengan cara memperbaharui (*updating*) nilai tahun dasar sesuai dengan indeks produksi atau tingkat pertumbuhan riil dari tahun sebelumnya.

c. Deflasi

Metode ini dilakukan dengan membagi nilai masing-masing tahun dengan relatif harga yang sesuai (indeks harga $\times 1/100$). Metode penghitungan yang sebenarnya bisa menggunakan kombinasi dari ketiga metode tersebut.

1.6. Masalah dan Keterbatasan

Yang menjadi masalah pokok dalam penghitungan Pendapatan Regional adalah bagaimana memperkirakan secara tepat pendapatan suatu daerah/regional, agar hasil penghitungan tersebut dapat mencerminkan keadaan perekonomian yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan oleh para pembuat keputusan dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan kebijakan pembangunan perekonomian.

Dalam penghitungan Pendapatan Regional beberapa masalah yang sering dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari hasil pendataan atau catatan administrasi berbagai instansi, seringkali data yang tersedia untuk lingkup wilayah tidak sama dengan wilayah administrasi. Akhirnya pemecahan menurut wilayah/regional terbentur kepada masalah teknis penyajian data.

Contoh : wilayah eksploitasi PLN biasanya tidak memerhatikan batas wilayah administrasi sehingga pemecahan menurut wilayah administrasi cukup sukar.

2. Dalam suatu perusahaan yang bersifat multiregional, sistem pembukuan perusahaan biasanya dilakukan secara sentral sehingga sukar untuk diperhitungkan secara regional. Misalnya : perusahaan penerbangan, pelayaran dan sebagainya.
3. Hasil suatu sampel survei atau proyeksi biasanya direncanakan untuk kepentingan nasional. Gambaran yang diperoleh hanya sampai tingkat provinsi. Dengan demikian menjadi kurang tepat bila diturunkan untuk Kotamadya.
4. Masalah lalu lintas perdagangan antara kotamadya dan kecamatan lebih sukar diteliti dibandingkan dengan lalu lintas perdagangan antar provinsi dan antar negara. Di dalam lingkup regional ekspor dan impor akan mencakup lalu lintas perdagangan melalui darat, antar pulau dan luar negeri. Sedangkan pada lingkup nasional hanya menyangkut perdagangan dengan luar negeri saja.

5. Masalah lain untuk penghitungan PDRB menurut kotamadya di DKI Jakarta adalah mobilitas penduduk yang cukup tinggi, kegiatan produksi dan distribusi antar wilayah yang sulit dibedakan, serta sangat minimnya data sosial ekonomi yang menggambarkan secara terinci dan jelas menurut wilayah kota tersebut.

Meskipun penghitungan pendapatan regional ditingkat provinsi, kotamadya dan kecamatan banyak memenuhi hambatan terutama dari segi tersedianya data, namun usaha-usaha untuk tetap dapat menyajikan angka-angka Pendapatan Regional ini serta penyempurnaannya akan terus dilakukan. Namun demikian perlu kiranya menjadi bahan pertimbangan bahwa semakin rendah unit wilayah yang akan dihitung (tingkat kecamatan, kelurahan), akan semakin langka dan sulit data yang tersedia. Disamping itu, keadaan perwilayahan yang semakin terbuka, menyulitkan pengumpulan datanya. Oleh sebab itu untuk penghitungan PDRB pada tingkat administrasi kecamatan misalnya, dipergunakan kombinasi antara metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect method*). Sepanjang data statistik tersedia di wilayah tersebut serta diyakini bahwa data tersebut cukup valid, metode langsung merupakan pilihan pertama. Sebaliknya, jika data terbatas atau data tidak tersedia tetapi

valid, lebih baik dipergunakan metode tidak langsung dengan memanfaatkan indikator-indikator statistik yang *relevan*, terukur dan *representative*.

<https://jakbarkota.bps.go.id>

BAB II

URAIAN SEKTORAL

Uraian sektoral yang disajikan pada bab ini mencakup ruang lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, cara-cara penghitungan nilai tambah baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, serta sumber datanya.

2.1 SEKTOR PERTANIAN

Kegiatan pertanian di Jakarta Barat mencakup usaha tanaman bahan makanan dan tanaman hias, usaha pemeliharaan ternak serta usaha pemeliharaan ikan, dan penangkapan ikan. Kegiatan pertanian lainnya seperti penanaman tanaman perdagangan dan kehutanan tidak terdapat di Jakarta Barat.

2.1.1 Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang-kacangan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Data produksi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan

Dinas/Suku Dinas Pertanian, sedangkan data mengenai harga seluruhnya bersumber dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi yaitu mengalikan setiap jenis kuantum produksi dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar harga berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara revaluasi, yaitu mengalikan produksi pada tahun bersangkutan dengan harga pada tahun 2000, kemudian dikurangi lagi dengan biaya antara atas dasar harga konstan 2000.

2.1.2 Tanaman Lainnya

Sub sektor ini mencakup kegiatan bercocok tanam dan pengolahan tanah lainnya untuk menghasilkan jenis tanaman yang biasa digunakan sebagai tanaman hias baik di dalam pot atau lainnya maupun langsung ditanam di pekarangan atau halaman. Jenis komoditinya mencakup antara lain tanaman anggrek dan bunga anggreknya, berbagai tanaman bunga serta tanaman hias lainnya.

Data produksi diperoleh dari Suku Dinas Pertanian Jakarta Barat, sedangkan data harga berupa harga perdagangan besar diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dihitung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan.

2.1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya

Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak, seperti sapi, kerbau, babi, kambing, domba, telur, susu segar serta hasil pemotongan hewan. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang dipotong ditambah perubahan stok populasi ternak dan ekspor ternak netto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, produksi susu dan telur diperoleh dari Dinas/Suku Dinas Peternakan Jakarta Barat. Sedangkan data mengenai harga ternak diperoleh dari BPS.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000 dihitung dengan cara mengalikan nilai produksi dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input-Output DKI Jakarta.

2.1.4 Perikanan

Komoditi yang dicakup adalah semua hasil dari kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah dan karamba. Data mengenai produksi diperoleh dari Suku Dinas Perikanan Jakarta Barat, sedangkan data mengenai harga diperoleh dari BPS. Penghitungan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 dilakukan dengan cara yang sama seperti pada sub sektor peternakan.

2.2 SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Tahun dasar 2000 merinci sektor industri pengolahan kedalam dua sub sektor, yaitu meliputi industri migas dan industri non migas. Namun karena industri migas tidak terdapat di Jakarta Barat tetapi berada di Kepulauan Seribu, maka pembahasan hanya dibatasi pada industri non migas.

Sub sektor industri non migas mencakup industri makanan, minuman & tembakau; industri tekstil, barang dari kulit & alas kaki; industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; industri kertas dan barang cetakan; industri pupuk, kimia dan barang dari karet; industri semen dan barang galian

bukan logam; industri logam dasar besi dan baja; industri alat angkutan, mesin dan peralatannya; serta industri barang lainnya yang belum tercakup.

Data mengenai indikator produksi diperoleh melalui survei tahunan industri besar/sedang, survei triwulanan industri besar/sedang, survei industri kecil dan kerajinan rumah tangga, serta dari instansi terkait. Penghitungan *output* atas dasar harga berlaku untuk kelompok industri besar/sedang digunakan pendekatan produksi, yaitu *output* dihitung lebih dahulu, kemudian dikurangi biaya antara dan diperoleh nilai tambah brutonya (NTB), sedangkan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang industri sebagai deflator.

Output atas dasar harga berlaku untuk kelompok industri kecil dihitung dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada kelompok Industri Besar/Sedang, sedangkan atas dasar harga konstan 2000 dihitung berdasarkan metode ekstrapolasi dengan Indeks Produksi sebagai ekstrapolatornya.

2.3 SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

Data produksi yang disajikan dalam publikasi ini adalah data dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Negara Gas (PNG) dan Perusahaan Air Minum (PAM).

Output masing-masing sub sektor mencakup semua produksi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan definisinya.

2.3.1 Listrik

Sub sektor ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi listrik yang diusahakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Data produksi, harga dan biaya antara sub sektor ini di peroleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Listrik Negara.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, dimana Indeks Tarif per Kwh digunakan sebagai deflator.

2.3.2 Gas

Yang dicakup dalam sub sektor ini adalah produksi gas dari Perusahaan Umum Gas Negara. Data produksi, harga dan biaya-biaya yang digunakan diperoleh dari Survei Tahunan Perusahaan Umum Gas Negara.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, dimana indeks tarif digunakan sebagai deflator.

2.3.3 Air Bersih

Sub sektor ini mencakup air bersih yang diusahakan oleh Perusahaan Air Minum. Data produksi, harga dan biaya-biaya yang digunakan diperoleh dari Survei Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan pendekatan produksi, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, dimana indeks tarif digunakan sebagai deflator.

2.4 SEKTOR BANGUNAN

Sektor bangunan mencakup semua kegiatan pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan maupun jaringan listrik, gas, air, telepon dan sebagainya. *Output* sektor bangunan diperoleh dari publikasi Statistik Bangunan/Konstruksi dan pengolahan hasil Susenas 2000. Sedangkan untuk memperoleh nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara mengalikan output dengan rasio nilai tambah berdasarkan hasil Survei Tahunan Konstruksi.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi, dimana IHPB barang-barang konstruksi digunakan sebagai deflator.

2.5 SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

2.5.1 Perdagangan Besar dan Eceran

Output perdagangan merupakan jumlah margin perdagangan yang timbul dari seluruh komoditi yang diperdagangkan, sedangkan margin perdagangan itu sendiri merupakan selisih antara nilai jual dengan nilai pembelian

setelah dikurangi dengan biaya angkutan yang dikeluarkan oleh pedagang.

Output atas dasar harga berlaku diperkirakan berdasarkan jumlah tenaga kerja dikalikan dengan rata-rata *output* per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di peroleh dengan cara mengalikan nilai *output* dengan rasio nilai tambah berdasarkan Survei Khusus Perdagangan dan Jasa.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan Indeks Harga Perdagangan Besar sebagai deflator.

2.5.2 H o t e l

Sub sektor ini mencakup semua hotel, baik berbintang maupun tidak berbintang, serta berbagai jenis penginapan lainnya.

Output dihitung dengan cara mengalikan jumlah kamar dengan *output* per kamar. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai *output* dengan rasio nilai tambah berdasarkan Survei Khusus Pendapatan Regional. Nilai tambah bruto atas dasar harga

konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan Indeks Harga Konsumen sebagai deflator.

2.5.3 Restoran

Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan dan penjualan makanan dan minuman jadi. Output diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah berdasarkan Tabel Input-Output DKI Jakarta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan Indeks Harga Konsumen kelompok makanan sebagai deflator.

2.6 SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai/danau ataupun udara, termasuk jasa penunjang angkutan dan komunikasi.

2.6.1 Pengangkutan

a. Angkutan Rel

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka). Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan Indeks Produksi banyaknya penumpang dan barang yang diangkut.

b. Angkutan Jalan Raya

Sub sektor ini meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum, baik bermotor ataupun tidak bermotor, seperti bis, truk, bemo, taksi, becak dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku didasarkan pada data jumlah armada angkutan umum barang dan penumpang yang diperoleh dari Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR). Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks produksi masing-masing jenis angkutan jalan raya.

c. Angkutan Laut

Meliputi kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan menggunakan kapal yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran milik nasional baik yang melakukan trayek dalam negeri maupun internasional. Karena kegiatan angkutan laut tidak terdapat di daerah ini, maka nilai tambah yang dihasilkan tidak ada.

d. Angkutan Udara

Mencakup kegiatan pengangkutan penumpang, barang dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan milik nasional, baik penerbangan dalam negeri maupun internasional. Karena kegiatan angkutan udara tidak terdapat di daerah ini, maka nilai tambah yang dihasilkan tidak ada.

e. Jasa Penunjang Angkutan

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan penyediaan fasilitas yang sifatnya menunjang dan berkaitan dengan kegiatan pengangkutan, seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan penumpang, ekspedisi, bongkar

muat, penyimpanan dan pergudangan serta jasa penunjang lainnya. *Output* atas dasar harga berlaku diperkirakan dengan perkalian masing-masing unit produksi dengan rata-rata tarifnya. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan rasio nilai tambah dengan output, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks masing-masing unit produksi.

2.6.2 Komunikasi

Kegiatan yang dicakup adalah jasa pos dan giro, telekomunikasi dan jasa penunjang komunikasi.

a. Pos dan Giro

Meliputi kegiatan pemberian jasa pos dan giro seperti pengiriman surat, wesel, paket, jasa giro, jasa tabungan dan sebagainya. Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku di dasarkan pada data produksi yang diperoleh dari Perusahaan Umum Pos dan Giro, sedangkan struktur biaya didasarkan pada Tabel Input Output DKI Jakarta. Nilai tambah bruto atas dasar

harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi, menggunakan indeks gabungan dari jumlah surat yang dikirim, barang yang dipaketkan dan sebagainya.

b. Telekomunikasi

Mencakup kegiatan pemberian jasa dalam hal pemakaian hubungan telepon, telegraf dan telex. Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Telkom dan PT. Indosat. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi dengan IHK umum sebagai deflator.

c. Jasa Penunjang Komunikasi

Mencakup kegiatan wartel/warpostel/warparpostel, radio panggil dan *handphone*. *Output* diperoleh dari perkalian antara indikator produksi masing-masing kegiatan dengan *output* per indikatornya, nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai output dengan rasio nilai tambah bruto. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung secara ekstrapolasi dengan indikator produksi masing-masing kegiatan sebagai ekstrapolator.

2.7 SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

Sektor ini meliputi kegiatan bank, lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan serta jasa perusahaan.

2.7.1 Bank

Nilai tambah bruto sub sektor bank atas dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi menggunakan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) umum sebagai deflatornya.

2.7.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Mencakup kegiatan asuransi, koperasi, lembaga pembiayaan, pegadaian dan dana pensiun. Penghitungan output atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalokasikan output nasional berdasarkan peranan kegiatan LKBB di Jakarta. Demikian juga untuk biaya antara dan nilai tambahnya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi dengan Indeks Harga Konsumen Umum sebagai deflator.

2.7.3 Jasa Penunjang Keuangan

Mencakup kegiatan perdagangan valuta asing, Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Paralel Indonesia (BPI), Bursa Komoditi, pialang, pedagang efek, penjamin emisi, wali amanat dan penanggung.

Output pedagang valuta asing diperoleh dari perkalian antara indikator produksi dengan *output* per indikator, sedangkan untuk kegiatan BEJ, BPI dan Bursa Komoditi diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Kegiatan lain, seperti pialang, pedagang efek dan sebagainya diperoleh dengan mengalokasikan *output* nasional berdasarkan kegiatannya di Jakarta.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dengan mengalikan nilai *output* dengan rasio nilai tambah bruto. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi menggunakan indeks harga saham gabungan untuk kegiatan bursa dan Indeks Harga Konsumen untuk kegiatan lainnya.

2.7.4 Sewa Bangunan

Mencakup usaha persewaan bangunan dan tanah, baik

yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan serta usaha persewaan tanah persil.

Output untuk persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita untuk sewa rumah, kontrak rumah, sewa beli rumah dinas, perkiraan sewa rumah, pajak dan pemeliharaan rumah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Data usaha persewaan bangunan tempat tinggal diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Sensus Penduduk (SP). Sedangkan *output* usaha persewaan bangunan bukan tempat tinggal diperoleh dari perkalian antara luas bangunan yang disewakan dengan rata-rata tarif sewa per meter persegi.

Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan *outputnya*. Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara deflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen Tempat Tinggal.

2.7.5 Jasa Perusahaan

Mencakup kegiatan pemberian jasa hukum (advokat

dan notaris), jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian data, jasa bangunan/arsitek dan teknik, jasa periklanan dan riset pemasaran, serta jasa persewaan mesin dan peralatan.

Output jasa perusahaan diperoleh dari perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata *output* per tenaga kerja, sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara rasio nilai tambah bruto dengan *output*nya. Selanjutnya perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan jumlah tenaga kerja sebagai ekstrapolatornya.

2.8 SEKTOR JASA-JASA

Mencakup jasa pemerintahan umum dan pertahanan serta jasa swasta yang meliputi jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa perorangan dan rumah tangga.

2.8.1 Pemerintahan Umum

Cakupan sub sektor ini meliputi administrasi pemerintahan umum dan pertahanan serta jasa pemerintahan

lainnya. Sub sektor pemerintahan umum dan pertahanan mencakup semua departemen dan non departemen, badan/lembaga tinggi negara, kantor-kantor pemerintah pusat dan daerah serta badan-badan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi pemerintahan dan pertahanan, termasuk juga kegiatan yang bersifat jasa seperti sekolah-sekolah pemerintah, universitas negeri, rumah sakit pemerintah, museum dan perpustakaan milik pemerintah dan sebagainya.

Nilai Tambah Bruto sektor pemerintahan umum terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai pemerintah pusat dan daerah, perkiraan komponen upah dari belanja pembangunan ditambah dengan perkiraan penyusutan sebesar lima persen. Data yang dipakai adalah data belanja pegawai pusat dan daerah, data belanja Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II (K1 dan K2) dan data belanja kelurahan (K3).

Data belanja pegawai pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tingkat I (K1) digunakan untuk mengalokasikan belanja pegawai pusat dan daerah Tingkat I yang dipekerjakan atau diperbantukan di wilayah Jakarta Barat dengan jumlah pegawai negeri sipil pusat dan daerah Tingkat I sebagai alokatornya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000

diperoleh dengan cara ekstrapolasi dengan menggunakan indeks tertimbang jumlah pegawai negeri sebagai ekstrapolatornya.

2.8.2 Jasa-jasa Swasta

a. Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan serta jasa kemasyarakatan lainnya, seperti jasa penelitian, rumah sakit, dokter praktek, panti asuhan, panti werdha, yayasan pemeliharaan anak cacat dan sebagainya, terbatas yang dikelola oleh swasta saja. Adapun kegiatan-kegiatan sejenis yang dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sektor pemerintahan.

Output atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan perkalian antara jumlah murid menurut tingkatan, jumlah tempat tidur rumah sakit, jumlah dokter, jumlah anak yang diasuh, jumlah orang tua yang dirawat dan sebagainya dengan rata-rata *output*nya.

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh berdasarkan rasio nilai tambah terhadap output yang bersumber dari hasil Survei Khusus Jasa-jasa DKI

Jakarta tahun 1996. Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi dengan perkembangan masing-masing indikator produksi sebagai ekstrapolatornya.

b. Jasa Hiburan dan Kebudayaan

Meliputi kegiatan produksi dan distribusi film, reproduksi film video, jasa bioskop dan panggung hiburan, perpustakaan, museum, gedung olah raga, kolam renang, klub malam, taman hiburan, lapangan golf, lapangan tenis, bilyard, klub olah raga, artis film, artis panggung, pub, bar, karaoke, video klip, studio televisi dan stasiun pemancar radio yang dikelola oleh swasta. *Output* atas dasar harga berlaku diperoleh dengan menggunakan metode pendekatan produksi, yaitu output diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harga. *Output* bioskop di peroleh dari hasil perkalian antara jumlah penonton dengan rata-rata *output* per penonton. Sedangkan output jasa hiburan dan rekreasi lainnya diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata *output* per tenaga kerja.

Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian *output* dengan rasio nilai tambah yang bersumber dari Survei Khusus Jasa-jasa DKI Jakarta tahun 1996.

Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan indeks indikator produksi masing-masing kegiatan.

c. Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Meliputi segala jenis kegiatan jasa yang pada umumnya melayani perorangan dan rumahtangga, yang terdiri dari jasa perbengkelan/repairasi, jasa pembantu rumahtangga dan jasa perorangan lainnya, seperti tukang binatu, tukang cukur, tukang jahit, tukang semir sepatu dan sejenisnya.

Output atas dasar harga berlaku untuk jasa perbengkelan serta jasa perorangan dan rumahtangga lainnya diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per tenaga kerja masing-masing kegiatan.

Sedangkan *output* jasa pembantu rumahtangga, pengasuh bayi dan sejenisnya diperoleh dari perkalian

antara pengeluaran per kapita untuk pembantu rumahtangga dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara output dengan rasio nilai tambah bruto yang bersumber dari Survei Khusus Jasa-jasa DKI Jakarta tahun 1996.

Sedangkan nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 diperoleh dengan cara ekstrapolasi menggunakan Indeks Indikator Produksi masing-masing kegiatan.

<https://jakbarkota.bps.go.id>

BAB III

TINJAUAN EKONOMI

Pola kegiatan ekonomi disuatu daerah akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti letak geografis, kondisi fisik, jumlah dan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, serta kondisi sosial budaya daerah yang bersangkutan. Faktor lain yang tidak kalah penting yaitu adanya peranan pemerintah sebagai fasilitator, peran swasta dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan, memonitoring dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan suatu wilayah diperlukan berbagai data statistik. Salah satu data statistik yang dapat dipakai sebagai indikator untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan wilayah adalah statistik pendapatan regional.

Berikut ini akan disajikan kinerja perekonomian Jakarta Barat ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi, peranan nilai tambah bruto sektoral dan kelompok sektor, serta perkembangan PDRB perkapita.

3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan membaiknya ekonomi global, kinerja perekonomian Kotamadya Jakarta Barat yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan selama kurun waktu empat tahun terakhir (2003-2006) menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan meskipun tidak terlalu besar. Pada tahun 2004 perekonomian Kotamadya Jakarta Barat tumbuh sebesar 5,48 persen atau nilai PDRB konstan sebesar Rp. 41,650.236 juta. Setahun kemudian (2005) PDRB konstan meningkat hingga mencapai Rp. 44,169.682 juta atau tumbuh sebesar 6,03 persen. Pada tahun 2006 kondisi perekonomian Kotamadya Jakarta Barat menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,95 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 0,08 point.

Jika diperhatikan keadaan setiap sektor dalam empat tahun terakhir, terlihat bahwa setiap sektor mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif.

Sektor pertanian di Jakarta Barat mengalami pertumbuhan yang tidak stabil, hal ini disebabkan intensitas pemanfaatan lahan pertanian di Jakarta Barat berfluktuasi.

Tahun 2003 pertumbuhan sektor pertanian sebesar 8,44 persen, dimana sub sektor tanaman bahan makanan tumbuh positif sebesar 12,12 persen. Namun tahun 2004 sektor pertanian ini mengalami kontraksi sebesar 3,46 persen, bahkan untuk tahun 2005 sektor ini mengalami kontraksi sebesar 5,53 persen, sedangkan tahun 2006 sedikit mengalami perlambatan kontraksi, yaitu sebesar 4,63 persen.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat menurut Lapangan Usaha, Tahun 2003-2006

Sektor	2003	2004	2005 ^{*)}	2006 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	8,44	- 3,46	- 5,53	- 4,63
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	4,22	5,01	4,55	3,79
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	4,90	8,07	8,13	6,33
5. Bangunan	4,18	6,92	7,59	7,77
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,52	5,86	5,98	6,06
7. Pengangkutan & Komunikasi	16,01	14,59	12,90	13,09
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,86	1,82	4,03	3,66
9. Jasa-jasa	2,65	5,56	4,93	4,84
Jakarta Barat	5,26	5,48	6,03	5,95

^{*)} Angka Perbaikan

^{**)} Angka Sementara

Sementara itu, sektor industri pengolahan di Jakarta Barat masih mengalami peningkatan produksi walaupun

“Pendapatan Regional Jakarta Barat, 2003-2006”

terjadi perlambatan laju pertumbuhan sejak tahun 2005. Tahun 2003 tumbuh mencapai angka 4,22 persen, kemudian tahun 2004 mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 5,01 persen. Tingginya pertumbuhan sektor ini terutama disumbangkan oleh sub sektor alat angkutan, mesin dan peralatannya yang tumbuh sebesar 9,53 persen. Namun pada tahun 2005 sektor ini hanya mengalami pertumbuhan sebesar 4,55 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama disumbangkan oleh sub sektor industri alat angkutan, mesin dan peralatan sebesar 7,77 persen, sedangkan beberapa sub sektor lainnya mengalami kontraksi yang tidak terlalu *significant*. Kemudian untuk tahun 2006 sedikit melambat yaitu hanya tumbuh sebesar 3,79 persen.

Sektor listrik, gas dan air bersih masih menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan sektor ini untuk tahun 2003 hanya mencapai sebesar 4,90 persen, namun untuk tahun 2004 angka pertumbuhannya meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 8,07 persen. Selanjutnya pada tahun 2005 meningkat kembali hingga mencapai 8,13 persen, namun di tahun 2006 sedikit melambat yaitu sebesar 6,33 persen. Sumbangan terbesar diberikan oleh sub sektor gas yang pertumbuhannya pada tahun 2006 mencapai 6,63 persen.

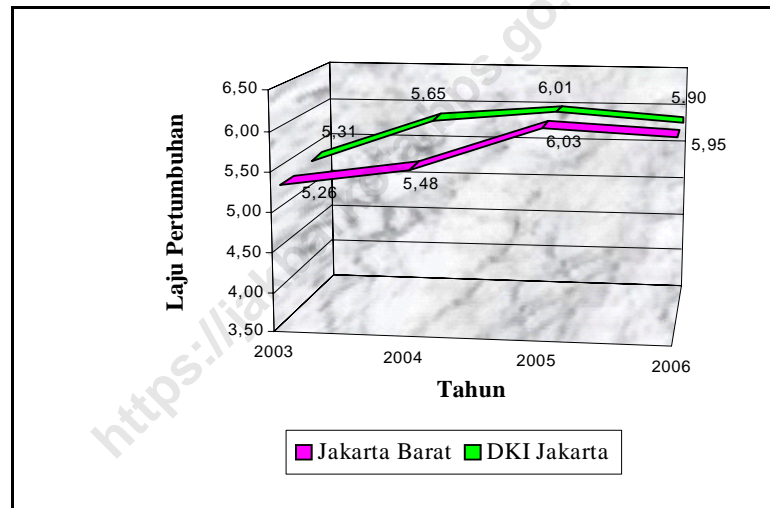
Tahun 2003 sektor bangunan mengalami pertumbuhan sebesar 4,18 persen dan pada tahun 2004 sebesar 6,92 persen, tahun 2005 pertumbuhan sektor ini semakin meningkat hingga mencapai 7,59 persen, bahkan pada tahun 2006 mencatat angka 7,77 persen. Bangkitnya sektor bangunan ditandai dengan dimulai kembali pembangunan fisik yang pelaksanaannya sempat mengalami *stagnant* (macet) karena adanya krisis yang berkepanjangan. Selain itu juga karena terjadi penurunan suku bunga bank, sehingga permintaan akan properti kembali meningkat. Prospek sektor ini diharapkan akan cerah, terutama dengan adanya berbagai proyek baru dalam pembangunan infrastruktur di berbagai sektor ekonomi.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang berperan sebagai penunjang kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk barang dan jasa tumbuh makin cepat pada periode tahun 2003-2006 secara berurutan dari tahun 2003 sebesar 5,52 persen, untuk tahun 2004 mencapai 5,86 persen, sedangkan tahun 2005 mencetak angka hingga 5,98 persen. Tahun 2006 terus mengalami peningkatan pertumbuhan hingga sebesar 6,06 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumsi masyarakat semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Selain itu minat

berbelanja juga semakin meningkat dipengaruhi oleh semakin banyaknya variasi barang yang diperdagangkan dengan makin maraknya barang-barang impor yang harganya relatif lebih murah.

Tingginya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2006, terutama disumbangkan oleh sub sektor hotel yang tumbuh sebesar 8,28 persen. Hal ini disebabkan karena tingkat hunian hotel oleh wisatawan (manca negara maupun nusantara) di Jakarta Barat cukup tinggi.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat dan DKI Jakarta, Tahun 2003-2006



Sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan pendorong aktivitas ekonomi tumbuh pesat, pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 13,09 persen dibandingkan dengan tahun 2005 hanya mencapai pertumbuhan sebesar 12,90 persen. Sedangkan tahun 2003 dan 2004 pertumbuhannya mencapai masing-masing 16,01 persen dan 14,59 persen. Meningkatnya angka pertumbuhan sektor ini disebabkan sub sektor komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat (tahun 2006 sebesar 20,75 persen) seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan semakin membudayanya telepon seluler sebagai alat komunikasi masyarakat.

Seiring dengan itu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2006 sedikit lebih lambat, yaitu mencatat angka pertumbuhan sebesar 3,66 persen jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang tumbuh mencapai 4,03 persen. Hal ini terutama dipengaruhi oleh beberapa sub sektor, antara lain sub sektor bank dari 2,06 persen pada tahun 2005 menjadi 1,60 persen pada tahun 2006. Pola yang sama juga terjadi pada sub sektor lembaga keuangan bukan bank, sewa bangunan, dan jasa perusahaan.

Laju pertumbuhan sektor jasa-jasa mengalami sedikit fluktuasi selama periode 2003-2006. Setelah mencatat

“Pendapatan Regional Jakarta Barat, 2003-2006” 48

pertumbuhan 2,65 persen pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 terjadi peningkatan, yaitu mencapai angka 5,56 persen, setahun kemudian (tahun 2005) pertumbuhan ini sedikit mengalami perlambatan, yaitu tumbuh hanya sebesar 4,93 persen, bahkan untuk tahun 2006 melambat lagi hingga pertumbuhan menjadi 4,84 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor ini disebabkan karena terjadi penurunan sub sektor swasta dari angka 5,26 persen pada tahun 2005 menjadi 5,24 persen pada tahun 2006. Hal ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan output dari seluruh komponen sub sektor pada sektor ini.

Analisa lain yang menarik untuk dicermati adalah besarnya sumbangan masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi di Jakarta Barat selama periode tertentu. Sektor-sektor ekonomi dengan nilai nominal besar akan menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi yang terbentuk meskipun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil, begitu pula sebaliknya.

Misalnya pada tahun 2006 untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai nominal 13,170 trilyun rupiah (atas dasar harga konstan) dengan angka pertumbuhan hanya 6,06 persen, tetapi dapat menyumbang

angka 1,58 dari nilai total pertumbuhan ekonomi di Jakarta Barat (lihat tabel 3.1.1)

Tabel 3.1.1 Sumbangan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Barat Tahun 2003-2006

Sektor	2003	2004	2005 ^{*)}	2006 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	0,01	- 0,01	- 0,01	- 0,01
2. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	0,39	0,44	0,39	0,31
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,05	0,08	0,09	0,07
5. Bangunan	0,39	0,60	0,68	0,76
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,52	1,60	1,63	1,58
7. Pengangkutan & Komunikasi	1,63	1,58	1,50	1,59
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,13	0,51	1,13	1,01
9. Jasa-jasa	0,33	0,68	0,62	0,64
Jakarta Barat	5,26	5,48	6,03	5,95

^{*)} Angka Perbaikan

^{**)} Angka Sementara

3.2 Struktur Ekonomi

Sejak lima tahun terakhir struktur perekonomian Jakarta Barat mengalami pergeseran. Dilihat dari strukturnya, perekonomian di Jakarta Barat didominasi oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa, sektor perdagangan hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa (lihat Tabel 3.4). Adanya

perbedaan laju pertumbuhan ekonomi sektoral seperti yang disajikan sebelumnya, telah menyebabkan terjadi sedikit pergeseran pada struktur ekonomi Jakarta Barat. Misalnya peranan sektor pengangkutan dan komunikasi sejak tahun 2003 sudah melampaui peranan sektor industri pengolahan. Namun demikian sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih merupakan sektor yang dominan, dimana kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB Jakarta Barat mencapai 54,78 persen pada tahun 2006.

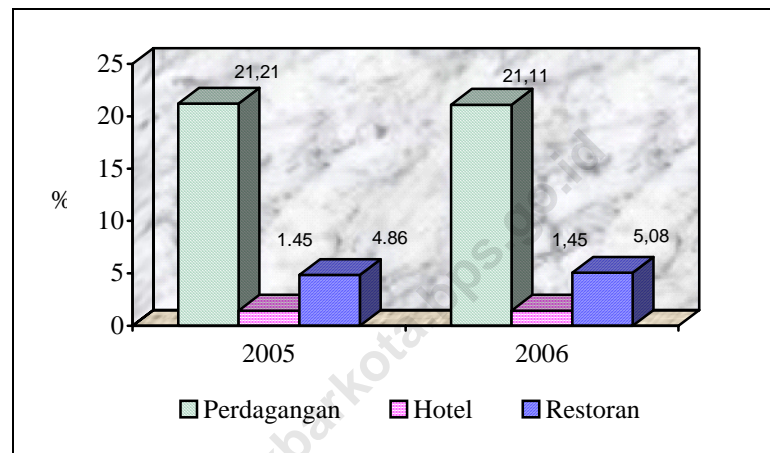
Tabel.3.2. Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan menurut Sub Sektor Tahun 2005-2006

Sub Sektor	Distribusi Persentase		Laju Pertumbuhan	
	2005	2006	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Bank	15,62	14,22	2,06	1,60
2 Lembaga Keuangan Tanpa Bank	2,27	2,23	6,49	6,08
3 Jasa Penunjang Keuangan Non Bank	0,22	0,22	6,92	6,38
4 Sewa Bangunan	6,66	6,78	7,46	7,27
5 Jasa Perusahaan	3,58	3,69	6,38	5,79
Sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Keuangan	28,36	27,13	4,03	3,66

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan salah satu sektor yang terbesar peranannya

dalam pembentukan PDRB Jakarta Barat. Selama periode 2003-2006, peranan sektor ini masih diatas 28 persen. Tahun 2003 kontribusinya mencapai 29,48 persen, berikutnya masing-masing dari tahun 2004 – 2006 peranannya terhadap PDRB adalah sebesar 29,02 persen, 28,36 persen, dan 28,01 persen.

Gambar.2. Distribusi Persentase Nilai Tambah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Terhadap PDRB Jakarta Barat Tahun 2005-2006



Peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Jakarta Barat sejak tahun 2003-2006 secara berurutan sebesar 27,54 persen, 27,51 persen, 27,52 persen dan 27,65 persen. Sejak tahun 2006 sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jakarta Barat.

Sektor lain yang peranannya juga signifikan terhadap pembentukan PDRB Kotamadya Jakarta Barat adalah sektor jasa. Peranan sektor ini masih cukup tinggi sepanjang periode tersebut, yaitu masih diatas angka 12,00 persen. Pada tahun 2003 peranan sektor ini terhadap PDRB Jakarta Barat adalah 12,68 persen, kemudian naik menjadi 12,73 persen tahun 2004, pada tahun 2005 turun menjadi 12,70 persen, dan pada tahun 2006 menjadi 12,64 persen.

Sektor-sektor lain yang peranannya menurun pada tahun 2006 adalah sektor pertanian dan sektor industri pengolahan.

Tabel.3.3. Distribusi Persentase dan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Menurut Sub Sektor Tahun 2005-2006

Sub sektor	Distribusi Persentase		Laju Pertumbuhan	
	2005	2006	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Makanan, minuman & tembakau	0,22	0,22	2,82	1,12
2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki	2,03	1,95	3,92	0,70
3. Barang kayu & hasil hutan lainnya	0,09	0,08	-1,45	-0,46
4. Kertas dan barang cetakan	0,11	0,10	3,85	4,32
5. Pupuk kimia dan barang dari karet	1,83	1,73	1,17	1,41
6. Semen dan barang galian bukan logam	0,92	0,89	2,19	4,24
7. Logam dasar besi dan baja	0,50	0,47	-0,13	1,52
8. Alat angkutan mesin dan peralatannya	3,32	3,33	7,77	6,43
9. Barang lainnya	0,05	0,05	-1,77	0,45
Industri Pengolahan	9,07	8,82	4,55	3,79

**Tabel 3.4 Kontribusi PDRB Jakarta Barat terhadap PDRB DKI
Tahun 2003 - 2006**

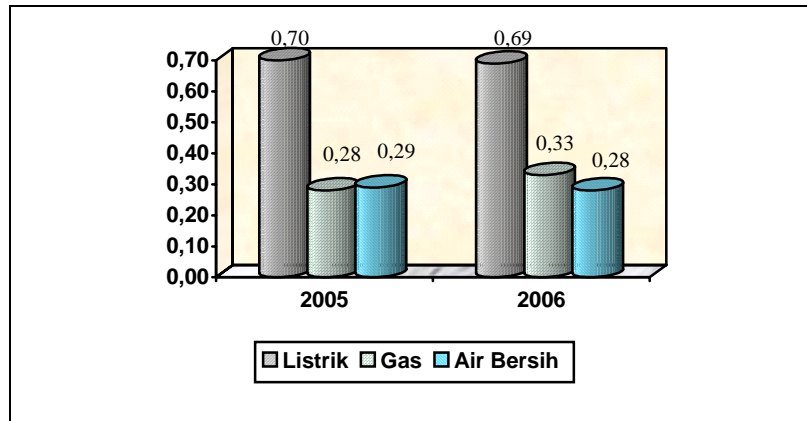
Sektor	2003	2004	2005 ^{*)}	2006 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	0,14	0,13	0,12	0,11
2. Industri Pengolahan	9,37	9,28	9,07	8,82
3. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,11	1,20	1,27	1,30
4. Bangunan	9,48	9,18	9,21	9,96
5. Perdagangan, Hotel dan Restoran	27,54	27,51	27,52	27,65
6. Pengangkutan dan Komunikasi	10,19	10,95	11,75	12,40
7. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	29,48	29,02	28,36	27,13
8. Jasa-jasa	12,68	12,73	12,70	12,64
Sektor	100,00	100,00	100,00	100,00

*) angka perbaikan

**) angka sementara

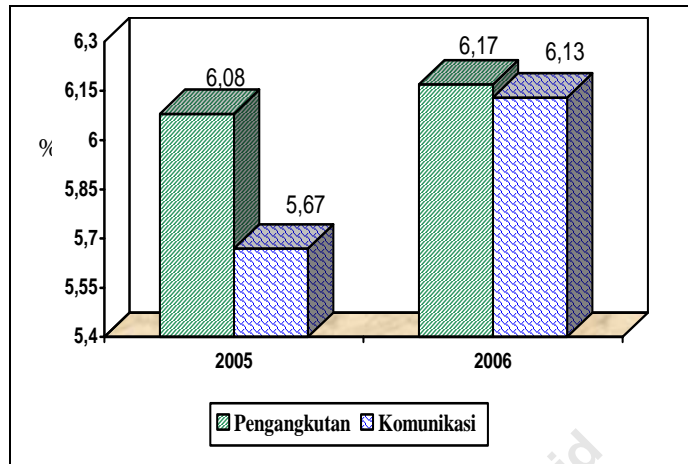
Walaupun kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih menurun dari 1,27 persen tahun 2005 menjadi 1,21 persen pada tahun 2006 yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya, namun peranan sektor ini sangat penting dalam menunjang aktivitas perekonomian di Jakarta Barat.

Gambar.3. Distribusi Persentase Nilai Tambah Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Tahun 2005-2006

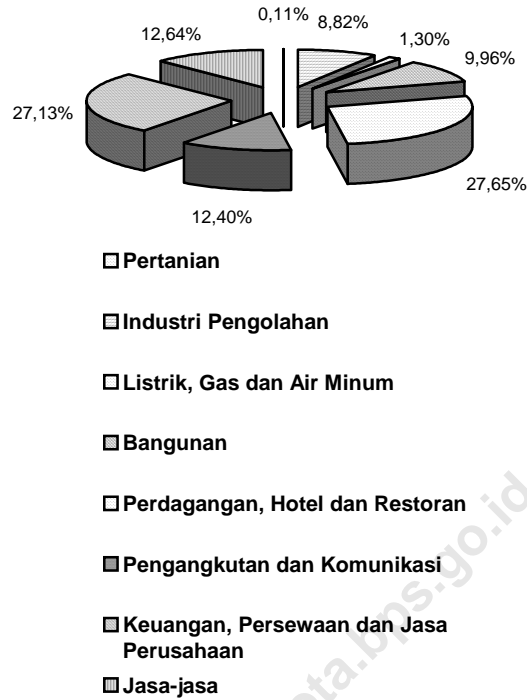


Peranan sektor pengangkutan dan komunikasi mempunyai kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, dari 11,75 persen tahun 2005 menjadi 12,40 persen di tahun 2006. Kecenderungan ini terutama dipengaruhi oleh sub sektor komunikasi yang mencatat angka kontribusi rata-rata diatas 5 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa sektor ini akan memiliki peran yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan semakin membudayanya penggunaan telepon genggam (*handphone*).

Gambar 4. Distribusi Persentase Nilai Tambah Sektor Pengangkutan dan komunikasi Jakarta Barat Tahun 2004-2005



Gambar 5. Distribusi Persentase PDRB Jakarta Barat menurut sektor usaha tahun 2006



3.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat secara kasar tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB perkapita mencerminkan tentang besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang

ada di suatu wilayah setelah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di wilayah tersebut. PDRB per kapita dihitung baik atas dasar harga berlaku (*current market price*) maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 (*constant 2000 market price*).

Dari Tabel 3.5 terlihat bahwa PDRB perkapita Jakarta Barat (atas dasar harga berlaku) terus menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dari 25,045 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 33,989 juta rupiah pada tahun 2006 atau mengalami kenaikan sebesar 35,71 persen. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan dari beberapa indikator produksi yang telah mempertimbangkan faktor inflasi. Demikian juga PDRB per kapita Jakarta Barat atas dasar harga konstan 2000 tercatat angka sebesar 19,847 juta rupiah pada tahun 2003 naik menjadi 21,494 juta rupiah pada tahun 2006 atau meningkat sebesar 8,30 persen. Kenaikan tersebut merupakan kenaikan riil sektor ekonomi yang mengabaikan faktor inflasi.

Peningkatan PDRB perkapita riil secara bertahap sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 ini terutama disebabkan oleh kembali bergairahnya kegiatan ekonomi diberbagai sektor.

Tabel 3.5 PDRB Perkapita Jakarta Barat 2003-2006

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2000
(1)	(2)	(3)
2003	25.045.725	19.847.328
2004	28.195.809	20.642.801
2005 ^{*)}	30.840.089	21.053.815
2006 ^{**)}	33.989.670	21.494.447

^{*)} angka perbaikan

^{**)} angka sementara

3.4. Inflasi/Deflasi

Inflasi maupun Deflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan gambaran terjadinya perubahan harga. Fluktuasi harga tersebut akan berpengaruh pada kemampuan daya beli konsumen akibat adanya ketidakseimbangan dengan pendapatan. Indeks harga ini dapat diturunkan dari PDRB yang disebut sebagai PDRB deflator atau dikenal dengan indeks implisit. Indeks ini merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan.

Berbeda dengan indeks harga konsumen, indeks implisit menggambarkan perubahan harga ditingkat produsen. Indeks implisit PDRB yang dihasilkan akan menggambarkan perkembangan perubahan harga.

Pertumbuhan dari indeks implisit inilah yang disebut sebagai indikator inflasi indeks harga implisit PDRB. (BPS, 1996). Bila dibandingkan dengan indeks harga konsumen, indeks harga implisit PDRB dapat dikatakan sejalan, hal ini dapat dilihat perubahan indeks pada tahun 2006 tidak sebesar pada tahun 2005.

Tabel.3.6 Indikator Inflasi Indeks Harga Implisit Menurut Lapangan Usaha 2003 – 2006

Lapangan Usaha	2003	2004	2005 ^{*)}	2006 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	3,60	2,32	16,90	8,35
2. Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	4,91	6,22	10,29	9,03
4. Listrik, Gas dan Air bersih	31,64	12,26	11,46	3,30
5. Bangunan	2,59	1,96	3,40	24,01
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	6,57	6,23	8,78	4,23
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,93	5,58	6,59	6,30
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,36	8,81	8,85	8,51
9. Jasa-jasa	11,03	7,08	9,82	16,29
Jakarta Barat	5,76	6,73	8,42	9,44

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

BAB IV

PERBANDINGAN PDRB ANTAR WILAYAH

Berhasilnya pembangunan ekonomi DKI Jakarta merupakan refleksi dari keberhasilan pembangunan ekonomi masing-masing wilayah kotamadya. Oleh karena itu tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah kotamadya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Untuk mendapatkan gambaran tentang peranan kinerja ekonomi Jakarta Barat dalam perekonomian DKI Jakarta, maka dalam sub bab ini dibahas secara khusus mengenai perbandingan PDRB antar wilayah dengan menampilkan ukuran-ukuran berupa laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi PDRB dan PDRB perkapita.

4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Untuk mengukur

besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya. Untuk melihat fluktuasi perekonomian secara riil, maka perlu disajikan PDRB atas dasar harga konstan secara berkala.

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi masing-masing kotamadya di lingkungan DKI Jakarta selama periode 2003-2006 menunjukkan keadaan yang bervariasi.

Sejak tahun 2000 merupakan titik tolak pemulihan ekonomi DKI Jakarta, hal ini karena sejak tahun tersebut laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mulai menunjukkan perbaikan dimana kontraksi pertumbuhan ekonomi sudah tidak terjadi lagi. Pada tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 5,31 persen, dan kondisi ini semakin membaik pada tahun 2004 dengan laju pertumbuhan mencapai 5,65 persen, bahkan untuk tahun 2005 mencapai angka 6,01 persen, namun sedikit menurun menjadi 5,90 pada tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DKI Jakarta sudah mulai menunjukkan pola yang stabil dan membaik.

Pola yang sama terjadi hampir diseluruh wilayah kotamadya pada periode tahun 2003 hingga tahun 2006 kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu. Jika dibandingkan antar wilayah, terjadi persaingan tingkat atau laju pertumbuhan ekonomi yang cukup ketat. Diawal periode tahun 2003 hampir merata angka laju pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah Kotamadya. Pada tahun 2004 Jakarta Pusat mencapai laju pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 6,00 persen, DKI Jakarta hanya mencapai 5,65 persen. Begitu pula pada tahun 2005, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Pusat masih menduduki tempat tertinggi yaitu sebesar 6,08 persen, lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta yang hanya mencapai 6,01 persen. Namun pada tahun 2006 Jakarta Timur menduduki urutan teratas dengan laju pertumbuhan sebesar 6,21 persen, diikuti oleh Jakarta Pusat sebesar 6,03 persen dan Jakarta Barat sebesar 5,95 persen. Ketiga wilayah kotamadya tersebut mempunyai laju pertumbuhan yang masih di atas DKI Jakarta yang hanya mencapai 5,90 persen pada tahun 2006.

Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kotamadya / Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2003 - 2006

Kotamadya/Kabupaten	2003	2004	2005 ^{*)}	2006 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jakarta Selatan	5,58	5,59	6,04	5,83
Jakarta Timur	5,26	5,75	6,04	6,21
Jakarta Pusat	5,18	6,00	6,08	6,03
Jakarta Barat	5,26	5,48	6,03	5,95
Jakarta Utara	5,24	5,75	6,02	5,81
Kepulauan Seribu	-13,67	-5,81	-6,10	2,10
DKI Jakarta	5,31	5,65	6,01	5,90

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

Sejak tahun 2002 Kepulauan Seribu sudah menjadi wilayah Kabupaten sendiri dan terpisah dengan Kotamadya Jakarta Utara, walau laju pertumbuhan ekonominya masih negatif, namun menunjukkan arah perbaikan di masa yang akan datang, karena kontraksi pertumbuhan ekonominya makin mengecil dari -13,67 persen pada tahun 2003 menjadi -5,81 persen pada tahun 2004, tetapi untuk tahun 2005 turun lagi menjadi -6,10 persen, kemudian naik menjadi 2,10 persen pada tahun 2006.

4.2 Kontribusi PDRB

Sumbangan masing-masing wilayah terhadap pembentukan PDRB DKI Jakarta disajikan pada Tabel 4.2. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2003-2006, Jakarta Barat memiliki kontribusi yang relatif kecil dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta dibanding dengan wilayah-wilayah lain, kecuali Kepulauan Seribu. Sementara sumbangan terbesar diberikan oleh Jakarta Pusat selama periode tersebut.

Apabila diamati pola kontribusi masing-masing wilayah terhadap pembentukan PDRB DKI Jakarta, terlihat bahwa Jakarta Pusat selalu menduduki tempat teratas dalam peranannya dan Kepulauan Seribu menduduki tempat terbawah, sementara posisi kedua ditempati Jakarta Selatan, diikuti Jakarta Utara, Jakarta Timur dan kemudian Jakarta Barat.

Tabel 4.2 Kontribusi PDRB Menurut Kotamadya/Kabupaten di DKI Jakarta, 2003-2006

Kotamadya/Kabupaten	2003	2004	2005 ^{*)}	2006 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jakarta Selatan	22,46	22,48	22,01	24,64
Jakarta Timur	17,04	17,09	16,98	18,69
Jakarta Pusat	26,43	26,46	26,40	29,22
Jakarta Barat	14,91	14,94	14,79	18,00
Jakarta Utara	18,84	18,87	18,86	21,72
Kepulauan Seribu	0,37	0,41	0,49	0,60
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

Jika peran PDRB Jakarta Barat dalam pembentukan PDRB DKI Jakarta dirinci menurut sektor, seperti tersaji pada Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa, pada tahun 2006 Jakarta Barat cukup dominan pada sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi. Peranan sektor-sektor tersebut terhadap sektor yang bersangkutan dalam PDRB DKI Jakarta pada tahun 2006 masing-masing adalah 18,73 persen, 22,37 persen, dan 25,87 persen.

Peranan sektor Listrik Gas dan Air bersih, sektor perdagangan, hotel & Restoran, serta sektor Pengangkutan & Komunikasi di Jakarta Barat terhadap sektor yang sama

dalam PDRB DKI Jakarta merupakan yang kedua terbesar dibandingkan dengan kotamadya lainnya. Peranan sektor Pertanian, sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-jasa terhadap sektor yang sama dalam kontribusi PDRB DKI Jakarta tahun 2006 menempati urutan ketiga dibandingkan dengan kotamadya lainnya. Khusus untuk sektor Pertambangan & Penggalan hanya dimiliki oleh wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu, kontribusinya terhadap sektor ini sebesar 100 persen.

Seperti terlihat pada Tabel 4.3, jika dibandingkan peran antar wilayah terhadap PDRB DKI Jakarta, untuk sektor Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan, sektor perdagangan, hotel & restoran, dan sektor jasa-jasa, peran yang terbesar diberikan oleh Jakarta Pusat, kemudian berturut-turut diikuti oleh Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Jakarta Utara merupakan wilayah konsentrasi untuk sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pertanian, dan sektor pengangkutan & komunikasi. Kontribusinya terhadap sektor yang sama PDRB DKI Jakarta berturut-turut sebesar 60,00 persen; 52,52 persen; 34,72 persen; dan 31,12 persen.

**Tabel 4.3 Kontribusi PDRB Sektoral Menurut Kotamadya/
Kabupaten di DKI Jakarta Tahun 2006 ^{**)}**

Sektor	Jaksel	Jaktim	Jakpus	Jakbar	Jakut	Kep. Seribu	DKI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	21,60	13,97	5,38	17,87	34,72	11,10	100,00
2. Pertambangan & Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3. Industri Pengolahan	3,00	39,00	2,00	9,00	60,00	0,01	100,00
4. Listrik, Gas & Air Bersih	11,09	14,21	12,99	18,73	52,52	0,02	100,00
5. Bangunan	29,07	16,26	24,01	16,61	20,85	0,05	100,00
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	22,36	18,37	27,02	22,37	19,01	0,10	100,00
7. Pengangkutan & Komunikasi	18,88	25,65	16,88	25,87	31,12	0,01	100,00
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	36,12	8,51	49,32	15,41	4,38	0,01	100,00
9. Jasa-jasa	29,15	17,15	31,85	17,95	13,27	0,05	100,00
PDRB	24,65	18,69	29,22	17,10	21,72	0,60	100,00

^{**)} angka sangat sementara

4.3 PDRB Perkapita

Secara umum, PDRB perkapita DKI Jakarta berada di bawah PDRB perkapita yang dicapai masing-masing kotamadya, kecuali Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan seribu. Dari Tabel 4.4 ditunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan dari 38,907 juta rupiah pada pada tahun 2003 menjadi 50,15 juta rupiah pada tahun 2005, selanjutnya menjadi 57,17 pada tahun 2006.

Begitu pula melalui penghitungan secara riil (atas dasar harga konstan 2000) PDRB Perkapita DKI Jakarta terus mengalami peningkatan dari 30,654 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 32,209 juta rupiah pada tahun 2004, kemudian 33,94 juta rupiah tahun 2005, dan 35,70 juta rupiah tahun 2006. Trend peningkatan PDRB perkapita juga dirasakan di lima wilayah kotamadya lainnya.

PDRB perkapita Jakarta Pusat (atas dasar harga berlaku) dari tahun ke tahun terus melesat jauh melebihi PDRB perkapita DKI Jakarta dan wilayah kotamadya lainnya. Pada tahun 2003 PDRB perkapita Jakarta Pusat sebesar 98,52 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 144,81 juta rupiah pada tahun 2006. Begitu juga secara riil, mengalami peningkatan dari 75,32 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 90,32 juta rupiah pada tahun 2006.

Sementara itu, sejak tahun 2003, PDRB perkapita yang dicapai Jakarta Barat lebih rendah dibanding dengan PDRB perkapita DKI Jakarta. PDRB perkapita Jakarta Barat adalah 25,05 juta rupiah pada tahun 2003, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai akhirnya mencatat angka 33,99 juta rupiah pada tahun 2006. Secara riil, PDRB perkapita Jakarta Barat juga mengalami peningkatan dari

19,85 juta rupiah pada tahun 2003 menjadi 21,49 juta rupiah pada tahun 2006.

Tabel 4.4 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2003-2006 (ribu rupiah)

Kotamadya	2003	2004	2005 ^{*)}	2006 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jakarta Selatan	40.348	44.646	48.793	53.830
Jakarta Timur	23.201	24.783	28.081	31.587
Jakarta Pusat	98.518	111.274	131.919	144.813
Jakarta Barat	25.046	27.815	30.745	33.990
Jakarta Utara	43.668	48.458	56.868	63.075
DKI Jakarta	38.907	43.518	50.146	57.168

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

Tabel 4.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kotamadya di DKI Jakarta, 2003-2006 (ribu rupiah)

Kotamadya	2003	2004	2005 ^{*)}	2006 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jakarta Selatan	31.654	33.009	33.052	33.925
Jakarta Timur	18.342	18.392	19.053	19.740
Jakarta Pusat	75.317	80.172	88.008	90.323
Jakarta Barat	19.847	20.694	21.062	21.494
Jakarta Utara	34.507	35.973	37.591	39.320
DKI Jakarta	30.654	32.209	33.941	35.698

^{*)} angka sementara

^{**)} angka sangat sementara

Tahun 2003 Jakarta Selatan menduduki posisi teratas dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,58 persen. Sementara pada tahun 2004 dan 2005 Jakarta Pusat menduduki posisi tersebut dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00 persen dan 6,08 persen. Sedangkan pada tahun 2006 posisi

teratas diraih oleh Jakarta Timur dengan laju pertumbuhan sebesar 6,21 persen. Pola laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun selama periode 2003-2006, menunjukkan adanya peningkatan dari masing-masing wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Seribu. Hal ini mengindikasikan adanya suatu perkembangan tingkat perekonomian yang semakin membaik di DKI Jakarta.

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**TABEL 1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*	2006**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	71.676	70.799	76.302	78.821
	a. Tanaman Bahan Makanan	54.151	51.063	54.939	55.936
	b. Tanaman Hias	12.052	13.194	14.279	14.748
	c. Peternakan	1.875	2.166	2.309	2.855
	d. Kehutanan	-	-	-	-
	e. Perikanan	3.598	4.376	4.776	5.282
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	4.669.195	5.208.346	5.866.906	6.525.805
	a. Industri Migas	-	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	4.669.195	5.208.346	5.866.906	6.525.805
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	126.383	134.452	143.622	159.497
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	1.022.874	1.158.814	1.313.399	1.443.946
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	54.064	55.160	57.262	61.187
	4) Kertas dan Barang Cetakan	55.362	60.811	67.965	73.025
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	980.425	1.068.414	1.185.044	1.281.551
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	470.820	533.411	595.714	658.073
	7) Logam Dasar Besi & Baja	264.431	289.496	321.042	345.239
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	1.667.528	1.878.301	2.150.917	2.467.449
	9) Barang lainnya	27.307	29.486	31.941	35.838
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	552.725	670.593	819.748	962.726
	a. Listrik	292.290	357.133	450.595	511.583
	b. Gas	129.021	153.169	184.202	240.684
	c. Air Bersih	131.414	160.290	184.951	210.459
5	B A N G U N A N	4.726.280	5.152.488	5.961.796	7.370.776
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	13.724.020	15.433.985	17.806.439	20.459.570
	a. Perdagangan	10.526.381	11.891.140	13.726.216	15.624.122
	b. Hotel	747.665	835.747	938.101	1.075.439
	c. Restoran	2.449.974	2.707.099	3.142.121	3.760.009
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	5.080.521	6.146.419	7.601.787	9.176.484
	a. Pengangkutan	2.838.283	3.297.289	3.934.589	4.600.861
	1) Angkutan Rel	113.802	114.413	116.740	129.275
	2) Angkutan Jalan Raya	1.821.558	2.091.896	2.512.074	2.922.318
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	902.923	1.090.979	1.305.775	1.549.269
	b. Komunikasi	2.242.238	2.849.131	3.667.197	4.575.623
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	14.695.532	16.282.217	18.349.529	20.079.396
	a. Bank	8.604.409	9.314.079	10.107.870	10.522.096
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan	1.132.608	1.260.253	1.469.664	1.648.539
	c. Jasa Penunjang Keuangan	113.265	128.637	144.432	163.621
	d. Sewa Bangunan	3.056.695	3.601.410	4.310.288	5.015.132
	e. Jasa Perusahaan	1.788.555	1.977.838	2.317.275	2.730.009
9	J A S A - J A S A	6.321.043	7.144.813	8.218.210	9.350.498
	a. Pemerintahan Umum	945.039	1.071.879	1.221.595	1.277.545
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-
	b. Swasta	5.376.004	6.072.934	6.996.615	8.072.952
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	1.270.312	1.498.318	1.669.184	1.869.676
	2) Hiburan dan Rekreasi	895.010	1.011.406	1.192.378	1.431.592
	3) Perorangan dan Rumahtangga	3.210.681	3.563.210	4.135.053	4.771.684
Produk Domestik Regional Bruto		49.840.993	56.109.661	64.700.717	74.004.076,42

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**TABEL 2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN
2000 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*	2006**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	54.610	52.719	49.802	47.494
	a. Tanaman Bahan Makanan	40.313	37.806	34.513	31.939
	b. Tanaman Hias	10.467	10.824	11.100	11.250
	c. Peternakan	1.640	1.876	1.885	1.914
	d. Kehutanan	-	-	-	-
	e. Perikanan	2.190	2.213	2.304	2.391
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	3.754.506	3.942.666	4.122.175	4.278.380
	a. Industri Migas	-	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	3.754.506	3.942.666	4.122.175	4.278.380
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	98.662	101.913	104.784	105.961
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	734.744	732.319	761.019	766.315
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	47.326	47.010	46.328	46.117
	4) Kertas dan Barang Cetakan	46.733	49.397	51.165	53.375
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	659.506	678.566	686.504	696.160
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	417.349	438.331	447.949	466.960
	7) Logam Dasar Besi & Baja	199.103	197.298	197.047	200.047
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	1.527.460	1.673.014	1.803.001	1.918.955
	9) Barang lainnya	23.623	24.819	24.380	24.490
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	300.198	324.427	350.814	373.035
	a. Listrik	122.640	134.666	144.264	153.249
	b. Gas	97.738	104.760	114.885	123.786
	c. Air Bersih	79.820	85.002	91.666	96.000
5	BANGUNAN	4.159.256	4.447.076	4.784.513	5.156.160
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	11.068.320	11.716.994	12.417.540	13.170.185
	a. Perdagangan	8.551.569	9.011.197	9.508.615	10.050.083
	b. Hotel	654.135	718.453	783.857	848.769
	c. Restoran	1.862.616	1.987.344	2.125.067	2.271.333
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	3.624.464	4.153.306	4.689.207	5.302.862
	a. Pengangkutan	2.008.870	2.216.579	2.354.095	2.483.133
	1) Angkutan Rel	67.943	67.625	66.821	70.412
	2) Angkutan Jalan Raya	1.305.777	1.492.506	1.590.263	1.676.615
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	635.150	656.449	697.011	736.106
	b. Komunikasi	1.615.594	1.936.727	2.335.112	2.819.729
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	11.563.576	11.774.430	12.249.471	12.698.173
	a. Bank	6.937.191	6.957.527	7.100.720	7.214.244
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	836.058	851.441	906.729	961.843
	c. Jasa Penunjang Keuangan	99.850	105.876	113.203	120.424
	d. Sewa Bangunan	2.070.027	2.122.768	2.281.192	2.447.034
	e. Jasa Perusahaan	1.620.450	1.736.818	1.847.627	1.954.628
9	JASA - JASA	4.971.253	5.247.618	5.506.160	5.772.538
	a. Pemerintahan Umum	557.401	558.281	570.180	577.798
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-
	b. Swasta	4.413.852	4.689.337	4.935.980	5.154.740
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	946.828	1.070.227	1.138.080	1.192.707
	2) Hiburan dan Rekreasi	617.037	660.711	701.345	742.233
	3) Perorangan dan Rumah tangga	2.849.987	2.958.399	3.096.556	3.219.799
Produk Domestik Regional Bruto		39.496.183	41.659.236	44.169.682	46.798.828

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**TABEL 3. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*)	2006**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	112,35	98,78	107,77	103,30
	a. Tanaman Bahan Makanan	113,76	94,30	107,59	101,82
	b. Tanaman Hias	108,37	109,48	108,22	103,28
	c. Peternakan	96,25	115,52	106,60	123,66
	d. Kehutanan	-	-	-	-
	e. Perikanan	115,10	121,62	109,13	110,60
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	109,34	111,55	112,64	111,23
	a. Industri Migas	-	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	109,34	111,55	112,64	111,23
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	107,97	106,38	106,82	111,05
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	117,18	113,29	113,34	109,94
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	106,83	102,03	103,81	106,86
	4) Kertas dan Barang Cetakan	121,28	109,84	111,77	107,44
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	110,17	108,97	110,92	108,14
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	106,55	113,29	111,68	110,47
	7) Logam Dasar Besi & Baja	104,10	109,48	110,90	107,54
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	106,02	112,64	114,51	114,72
	9) Barang lainnya	106,90	107,98	108,33	112,20
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	138,09	121,32	122,24	117,44
	a. Listrik	157,58	122,18	126,17	113,54
	b. Gas	110,90	118,72	120,26	130,66
	c. Air Bersih	133,49	121,97	115,39	113,79
5	BANGUNAN	106,88	109,02	115,71	123,63
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	112,46	112,46	115,37	114,90
	a. Perdagangan	111,91	112,97	115,43	113,83
	b. Hotel	112,09	111,78	112,25	114,64
	c. Restoran	115,01	110,49	116,07	119,66
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	121,73	120,98	123,68	120,71
	a. Pengangkutan	119,93	116,17	119,33	116,93
	1) Angkutan Rel	100,30	100,54	102,03	110,74
	2) Angkutan Jalan Raya	123,76	114,84	120,09	116,33
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	115,58	120,83	119,69	118,65
	b. Komunikasi	124,08	127,07	128,71	124,77
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	107,34	110,80	112,70	109,43
	a. Bank	102,27	108,25	108,52	104,10
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan	110,80	111,27	116,62	112,17
	c. Jasa Penunjang Keuangan	110,75	113,57	112,28	113,29
	d. Sewa Bangunan	120,28	117,82	119,68	116,35
	e. Jasa Perusahaan	111,03	110,58	117,16	117,81
9	JASA - JASA	113,97	113,03	115,02	113,78
	a. Pemerintahan Umum	123,63	113,42	113,97	104,58
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-
	b. Swasta	112,43	112,96	115,21	115,38
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	120,32	117,95	111,40	112,01
	2) Hiburan dan Rekreasi	124,90	113,00	117,89	120,06
	3) Perorangan dan Rumahtangga	106,69	110,98	116,05	115,40
Produk Domestik Regional Bruto		111,33	112,58	115,31	114,38

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**TABEL 4. INDEKS BERANTAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*	2006**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	108,44	96,54	94,47	95,37
	a. Tanaman Bahan Makanan	112,12	93,78	91,29	92,54
	b. Tanaman Hias	103,36	103,41	102,55	101,35
	c. Peternakan	93,94	114,42	100,48	101,54
	d. Kehutanan	-	-	-	-
	e. Perikanan	86,60	101,06	104,12	103,77
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	104,22	105,01	104,55	103,79
	a. Industri Migas	-	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	104,22	105,01	104,55	103,79
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	103,50	103,30	102,82	101,12
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	105,41	99,67	103,92	100,70
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	104,83	99,33	98,55	99,54
	4) Kertas dan Barang Cetak	117,71	105,70	103,58	104,32
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	101,18	102,89	101,17	101,41
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	105,44	105,03	102,19	104,24
	7) Logam Dasar Besi & Baja	95,94	99,09	99,87	101,52
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	105,51	109,53	107,77	106,43
	9) Barang lainnya	105,26	105,06	98,23	100,45
3	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	104,90	108,07	108,13	106,33
	a. Listrik	103,01	109,81	107,13	106,23
	b. Gas	105,99	107,18	109,67	107,75
	c. Air Bersih	106,56	106,49	107,84	104,73
4	BANGUNAN	104,18	106,92	107,59	107,77
5	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	105,52	105,86	105,98	106,06
	a. Perdagangan	106,29	105,37	105,52	105,69
	b. Hotel	100,11	109,83	109,10	108,28
	c. Restoran	104,03	106,70	106,93	106,88
6	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	116,01	114,59	112,90	113,09
	a. Pengangkutan	113,16	110,34	106,20	105,48
	1) Angkutan Rel	85,45	99,53	98,81	105,37
	2) Angkutan Jalan Raya	117,17	114,30	106,55	105,43
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	109,27	103,35	106,18	105,61
	b. Komunikasi	119,75	119,88	120,57	120,75
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-
7	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	103,86	101,82	104,03	103,66
	a. Bank	101,77	100,29	102,06	101,60
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan	105,74	101,84	106,49	106,08
	c. Jasa Penunjang Keuangan	105,62	106,03	106,92	106,38
	d. Sewa Bangunan	106,74	102,55	107,46	107,27
	e. Jasa Perusahaan	108,53	107,18	106,38	105,79
8	JASA - JASA	102,65	105,56	104,93	104,84
	a. Pemerintahan Umum	100,76	100,16	102,13	101,34
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-
	b. Swasta	102,90	106,24	105,26	104,43
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	107,71	113,03	106,34	104,80
	2) Hiburan dan Rekreasi	107,05	107,08	106,15	105,83
	3) Perorangan dan Rumahtangga	100,56	103,80	104,67	103,98
Produk Domestik Regional Bruto		105,26	105,48	106,03	105,95

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**TABEL 5. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*)	2006**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	119,02	117,56	126,70	130,88
	a. Tanaman Bahan Makanan	121,08	114,17	122,84	125,07
	b. Tanaman Hias	128,24	140,39	151,93	156,92
	c. Peternakan	138,07	159,50	170,03	210,26
	d. Kehutanan	-	-	-	-
	e. Perikanan	75,89	92,30	100,73	111,41
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	140,90	157,17	177,04	196,92
	a. Industri Migas	-	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	140,90	157,17	177,04	196,92
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	130,29	138,60	148,06	164,42
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	160,25	181,54	205,76	226,21
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	118,78	121,19	125,81	134,43
	4) Kertas dan Barang Cetak	179,50	197,17	220,36	236,77
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	151,98	165,62	183,70	198,66
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	129,36	146,56	163,68	180,81
	7) Logam Dasar Besi & Baja	117,14	128,24	142,22	152,93
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	133,69	150,59	172,45	197,82
	9) Barang lainnya	135,87	146,72	158,93	178,32
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	220,78	267,87	327,44	384,56
	a. Listrik	275,51	336,63	424,72	482,21
	b. Gas	164,89	195,76	235,42	307,60
	c. Air Bersih	199,08	242,82	280,18	318,82
5	B A N G U N A N	122,69	133,76	154,77	191,35
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	143,47	161,34	186,14	213,88
	a. Perdagangan	140,73	158,98	183,51	208,89
	b. Hotel	143,67	160,60	180,27	206,66
	c. Restoran	156,45	172,86	200,64	240,10
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	206,44	249,75	308,89	372,87
	a. Pengangkutan	184,93	214,84	256,36	299,77
	1) Angkutan Rel	141,99	142,75	145,65	161,29
	2) Angkutan Jalan Raya	193,00	221,64	266,16	309,63
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	176,76	213,58	255,63	303,29
	b. Komunikasi	242,08	307,60	395,92	493,99
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	145,37	161,07	181,52	198,63
	a. Bank	138,80	150,25	163,06	169,74
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan c. Jasa Penunjang Keuangan	175,50	195,28	227,72	255,44
	d. Sewa Bangunan	133,61	151,74	170,38	193,01
	e. Jasa Perusahaan	165,74	195,27	233,71	271,93
		133,90	148,07	173,49	204,39
9	J A S A - J A S A	138,08	156,07	179,52	204,26
	a. Pemerintah Umum	171,44	194,45	221,61	231,76
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-
	b. Swasta	133,51	150,82	173,76	200,49
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	157,87	186,20	207,44	232,35
	2) Hiburan dan Rekreasi	182,89	206,67	243,65	292,54
	3) Perorangan dan Rumahtangga	117,50	130,40	151,33	174,62
Produk Domestik Regional Bruto		145,77	164,11	189,24	216,45

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**TABEL 6. INDEKS PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*)	2006**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PERTANIAN	90,68	87,54	82,70	78,86
	a. Tanaman Bahan Makanan	90,14	84,53	77,17	71,41
	b. Tanaman Hias	111,38	115,17	118,11	119,71
	c. Peternakan	120,73	138,14	138,80	140,94
	d. Kehutanan	-	-	-	-
	e. Perikanan	46,19	46,68	48,60	50,43
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	113,30	118,97	124,39	129,10
	a. Industri Migas	-	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	113,30	118,97	124,39	129,10
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	101,71	105,06	108,02	109,23
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	115,11	114,73	119,22	120,05
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	103,98	103,28	101,78	101,32
	4) Kertas dan Barang Cetak	151,52	160,16	165,89	173,06
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	102,23	105,19	106,42	107,91
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	114,67	120,43	123,08	128,30
	7) Logam Dasar Besi & Baja	88,20	87,40	87,29	88,62
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	122,46	134,13	144,55	153,85
	9) Barang lainnya	117,54	123,49	121,31	121,85
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	119,91	129,59	140,13	149,01
	a. Listrik	115,60	126,93	135,98	144,45
	b. Gas	124,91	133,89	146,83	158,20
	c. Air Bersih	120,92	128,77	138,86	145,43
5	B A N G U N A N	107,97	115,45	124,21	133,85
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	115,70	122,48	129,81	137,68
	a. Perdagangan	114,33	120,48	127,13	134,37
	b. Hotel	125,70	138,06	150,63	163,10
	c. Restoran	118,94	126,90	135,70	145,04
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	147,27	168,76	190,54	215,47
	a. Pengangkutan	130,89	144,42	153,38	161,79
	1) Angkutan Rel	84,77	84,37	83,37	87,85
	2) Angkutan Jalan Raya	138,35	158,14	168,49	177,64
	3) Angkutan Laut	-	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	124,34	128,51	136,45	144,10
	b. Komunikasi	174,42	209,09	252,10	304,42
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	114,39	116,47	121,17	125,61
	a. Bank	111,91	112,24	114,55	116,38
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan c. Jasa Penunjang Keuangan	129,55	131,93	140,50	149,04
	d. Sewa Bangunan	117,79	124,89	133,54	142,05
	e. Jasa Perusahaan	112,24	115,10	123,69	132,68
		121,32	130,03	138,32	146,34
9	J A S A - J A S A	108,59	114,63	120,28	126,10
	a. Pemerintahan Umum	101,12	101,28	103,44	104,82
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-	-
	b. Swasta	109,62	116,46	122,58	128,02
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	117,67	133,00	141,43	148,22
	2) Hiburan dan Rekreasi	126,09	135,01	143,31	151,67
	3) Perorangan dan Rumah tangga	104,30	108,26	113,32	117,83
Produk Domestik Regional Bruto		115,52	121,84	129,19	136,88

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**TABEL 8. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PERTANIAN	0,14	0,13	0,12
	a. Tanaman Bahan Makanan	0,11	0,09	0,08
	b. Tanaman Hias	0,02	0,02	0,02
	c. Peternakan	0,00	0,00	0,00
	d. Kehutanan	-	-	-
	e. Perikanan	0,01	0,01	0,01
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	9,37	9,28	9,07
	a. Industri Migas	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	9,37	9,28	9,07
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	0,25	0,24	0,22
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	2,05	2,07	2,03
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	0,11	0,10	0,09
	4) Kertas dan Barang Cetakan	0,11	0,11	0,11
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	1,97	1,90	1,83
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	0,94	0,95	0,92
	7) Logam Dasar Besi & Baja	0,53	0,52	0,50
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	3,35	3,35	3,32
	9) Barang lainnya	0,05	0,05	0,05
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	1,11	1,20	1,27
	a. Listrik	0,59	0,64	0,70
	b. Gas	0,26	0,27	0,28
	c. Air Bersih	0,26	0,29	0,29
5	BANGUNAN	9,48	9,18	9,21
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	27,54	27,51	27,52
	a. Perdagangan	21,12	21,19	21,21
	b. Hotel	1,50	1,49	1,45
	c. Restoran	4,92	4,82	4,86
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	10,19	10,95	11,75
	a. Pengangkutan	5,69	5,88	6,08
	1) Angkutan Rel	0,23	0,20	0,18
	2) Angkutan Jalan Raya	3,65	3,73	3,88
	3) Angkutan Laut	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	1,81	1,94	2,02
	b. Komunikasi	4,50	5,08	5,67
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	29,48	29,02	28,36
	a. Bank	17,26	16,60	15,62
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan	2,27	2,25	2,27
	c. Jasa Penunjang Keuangan	0,23	0,23	0,22
	d. Sewa Bangunan	6,13	6,42	6,66
	e. Jasa Perusahaan	3,59	3,52	3,58
9	JASA - JASA	12,68	12,73	12,70
	a. Pemerintahan Umum	1,90	1,91	1,89
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-
	b. Swasta	10,79	10,82	10,81
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	2,55	2,67	2,58
	2) Hiburan dan Rekreasi	1,80	1,80	1,84
	3) Perorangan dan Rumahtangga	6,44	6,35	6,39
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

**TABEL 9. DISTRIBUSI PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*)
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)
1	PERTANIAN	0,14	0,13	0,11
	a. Tanaman Bahan Makanan	0,10	0,09	0,08
	b. Tanaman Hias	0,03	0,03	0,03
	c. Peternakan	0,00	0,00	0,00
	d. Kehutanan	-	-	-
	e. Perikanan	0,01	0,01	0,01
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	9,51	9,46	9,33
	a. Industri Migas	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	9,51	9,46	9,33
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	0,25	0,24	0,24
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	1,86	1,76	1,72
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	0,12	0,11	0,10
	4) Kertas dan Barang Cetak	0,12	0,12	0,12
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	1,67	1,63	1,55
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	1,06	1,05	1,01
	7) Logam Dasar Besi & Baja	0,50	0,47	0,45
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	3,87	4,02	4,08
	9) Barang lainnya	0,06	0,06	0,06
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	0,76	0,78	0,79
	a. Listrik	0,31	0,32	0,33
	b. Gas	0,25	0,25	0,26
	c. Air Bersih	0,20	0,20	0,21
	-	-	-	-
5	BANGUNAN	10,53	10,67	10,83
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	28,02	28,13	28,11
	a. Perdagangan	21,65	21,63	21,53
	b. Hotel	1,66	1,72	1,77
	c. Restoran	4,72	4,77	4,81
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	9,18	9,97	10,62
	a. Pengangkutan	5,09	5,32	5,33
	1) Angkutan Rel	0,17	0,16	0,15
	2) Angkutan Jalan Raya	3,31	3,58	3,60
	3) Angkutan Laut	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	1,61	1,58	1,58
	b. Komunikasi	4,09	4,65	5,29
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	29,28	28,26	27,73
	a. Bank	17,56	16,70	16,08
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan	2,12	2,04	2,05
	c. Jasa Penunjang Keuangan	0,25	0,25	0,26
	d. Sewa Bangunan	5,24	5,10	5,16
	e. Jasa Perusahaan	4,10	4,17	4,18
9	JASA - JASA	12,59	12,60	12,47
	a. Pemerintahan Umum	1,41	1,34	1,29
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-
	b. Swasta	11,18	11,26	11,18
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	2,40	2,57	2,58
	2) Hiburan dan Rekreasi	1,56	1,59	1,59
	3) Perorangan dan Rumah tangga	7,22	7,10	7,01
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

2006**)

(6)

0,11
0,08
0,02
0,00
-
0,01
-
-
-
-
8,82
-
-
8,82
0,22
1,95
0,08
0,10
1,73
0,89
0,47
3,33
0,05
1,30
0,69
0,33
0,28
9,96
27,65
21,11
1,45
5,08
12,40
6,22
0,17
3,95
-
-
-
2,09
6,18
-
-
27,13
14,22
2,23
0,22
6,78
3,69
12,64
1,73
-
-
10,91
2,53
1,93
6,45

100,00

<https://jakbarkota.bps.go.id>

2006**) <https://jakbarkota.bps.go.id>

(6)

0,10
0,07
0,02
0,00
-
0,01

-
-
-

9,14

-

-

9,14

0,23
1,64
0,10
0,11
1,49
1,00
0,43
4,10
0,05

0,80

0,33
0,26
0,21
-

11,02

28,14

21,48
1,81
4,85

11,33

5,31

0,15
3,58

-

-

1,57

6,03

-

-

27,13

15,42
2,06
0,26
5,23
4,18

12,33

1,23

-

-

11,01

2,55
1,59
6,88

100,00

**TABEL 7. INDEKS HARGA IMPLISIT PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA**

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PERTANIAN	131,25	134,29	153,21
	a. Tanaman Bahan Makanan	134,33	135,06	159,18
	b. Tanaman Hias	115,14	121,90	128,64
	c. Peternakan	114,36	115,46	122,50
	d. Kehutanan	-	-	-
	e. Perikanan	164,31	197,75	207,27
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	124,36	132,10	142,33
	a. Industri Migas	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	124,36	132,10	142,33
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	128,10	131,93	137,06
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	139,21	158,24	172,58
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	114,24	117,34	123,60
	4) Kertas dan Barang Cetak	118,47	123,11	132,84
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	148,66	157,45	172,62
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	112,81	121,69	132,99
	7) Logam Dasar Besi & Baja	132,81	146,73	162,93
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	109,17	112,27	119,30
	9) Barang lainnya	115,60	118,81	131,01
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	184,12	206,70	233,67
	a. Listrik	238,33	265,20	312,34
	b. Gas	132,01	146,21	160,34
	c. Air Bersih	164,64	188,57	201,77
5	BANGUNAN	113,63	115,86	124,61
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	123,99	131,72	143,40
	a. Perdagangan	123,09	131,96	144,36
	b. Hotel	114,30	116,33	119,68
	c. Restoran	131,53	136,22	147,86
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	140,17	147,99	162,11
	a. Pengangkutan	141,29	148,76	167,14
	1) Angkutan Rel	167,50	169,19	174,71
	2) Angkutan Jalan Raya	139,50	140,16	157,97
	3) Angkutan Laut	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	142,16	166,19	187,34
	b. Komunikasi	138,79	147,11	157,05
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	127,08	138,28	149,80
	a. Bank	124,03	133,87	142,35
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan	135,47	148,01	162,08
	c. Jasa Penunjang Keuangan	113,44	121,50	127,59
	d. Sewa Bangunan	147,66	169,66	188,95
	e. Jasa Perusahaan	110,37	113,88	125,42
9	JASA - JASA	127,15	136,15	149,25
	a. Pemerintah Umum	169,54	192,00	214,25
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-
	b. Swasta	121,80	129,51	141,75
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	134,17	140,00	146,67
	2) Hiburan dan Rekreasi	145,05	153,08	170,01
	3) Perorangan dan Rumahtangga	112,66	120,44	133,54
Produk Domestik Regional Bruto		126,19	134,69	146,48

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

TABEL 11. ANGKA PERTUMBUHAN PDRB

N0.	LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PERTANIAN	8,44	-3,46	-5,53
	a. Tanaman Bahan Makanan	12,12	-6,22	-8,71
	b. Tanaman Hias	3,36	3,41	2,55
	c. Peternakan	-6,06	14,42	0,48
	d. Kehutanan	-	-	-
	e. Perikanan	-13,40	1,06	4,12
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	-	-	-
	a. Minyak dan Gas Bumi	-	-	-
	b. Pertambangan tanpa Migas	-	-	-
	c. Penggalian	-	-	-
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,22	5,01	4,55
	a. Industri Migas	-	-	-
	1) Pengilangan Minyak Bumi	-	-	-
	2) Gas Alam Cair	-	-	-
	b. Industri Tanpa Migas	4,22	5,01	4,55
	1) Makanan, Minuman & Tembakau	3,50	3,30	2,82
	2) Tekstil, Barang Kulit & Alas kaki	5,41	-0,33	3,92
	3) Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya	4,83	-0,67	-1,45
	4) Kertas dan Barang Cetak	17,71	5,70	3,58
	5) Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet	1,18	2,89	1,17
	6) Semen dan Barang Galian bukan logam	5,44	5,03	2,19
	7) Logam Dasar Besi & Baja	-4,06	-0,91	-0,13
	8) Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya	5,51	9,53	7,77
	9) Barang lainnya	5,26	5,06	-1,77
4	LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	4,90	8,07	8,13
	a. Listrik	3,01	9,81	7,13
	b. Gas	5,99	7,18	9,67
	c. Air Bersih	6,56	6,49	7,84
		-	-	-
5	BANGUNAN	4,18	6,92	7,59
6	PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	5,52	5,86	5,98
	a. Perdagangan	6,29	5,37	5,52
	b. Hotel	0,11	9,83	9,10
	c. Restoran	4,03	6,70	6,93
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	16,01	14,59	12,90
	a. Pengangkutan	13,16	10,34	6,20
	1) Angkutan Rel	-14,55	-0,47	-1,19
	2) Angkutan Jalan Raya	17,17	14,30	6,55
	3) Angkutan Laut	-	-	-
	4) Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan	-	-	-
	5) Angkutan Udara	-	-	-
	6) Jasa Penunjang Angkutan	9,27	3,35	6,18
	b. Komunikasi	19,75	19,88	20,57
	1) Pos dan Telekomunikasi	-	-	-
	2) Jasa Penunjang Komunikasi	-	-	-
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	3,86	1,82	4,03
	a. Bank	1,77	0,29	2,06
	b. Lembaga Keuangan tanpa Bank dan	5,74	1,84	6,49
	c. Jasa Penunjang Keuangan	5,62	6,03	6,92
	d. Sewa Bangunan	6,74	2,55	7,46
	e. Jasa Perusahaan	8,53	7,18	6,38
9	JASA - JASA	2,65	5,56	4,93
	a. Pemerintahan Umum	0,76	0,16	2,13
	1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	-	-	-
	2. Jasa Pemerintah lainnya	-	-	-
	b. Swasta	2,90	6,24	5,26
	1) Sosial dan Kemasyarakatan	7,71	13,03	6,34
	2) Hiburan dan Rekreasi	7,05	7,08	6,15
	3) Perorangan dan Rumah tangga	0,56	3,80	4,67
Produk Domestik Regional Bruto		5,26	5,48	6,03

*) Angka perbaikan

**) Angka sementara

<https://jakbarkota.bps.go.id>

2006)**

(6)

165,96
175,13
131,09
149,19
-
220,91

-
-
-

152,53
-
-

152,53
150,52
188,43
132,68
136,81
184,09
140,93
172,58
128,58
146,34

258,08
333,82
194,43
219,23

142,95

155,35
155,46
126,71
165,54

173,05
185,28
183,60
174,30

-
-

210,47

162,27

-
-

158,13

145,85
171,39
135,87
204,95
139,67

161,98
221,11

-
-

156,61
156,76
192,88
148,20

158,13

<https://jakbarkota.bps.go.id>

2006**)

(6)

-4,63

-7,46

1,35

1,54

-

3,77

-

-

-

-

3,79

-

-

-

3,79

1,12

0,70

-0,46

4,32

1,41

4,24

1,52

6,43

0,45

6,33

6,23

7,75

4,73

-

7,77

6,06

5,69

8,28

6,88

13,09

5,48

5,37

5,43

-

-

5,61

20,75

-

-

3,66

1,60

6,08

6,38

7,27

5,79

4,84

1,34

-

-

4,43

4,80

5,83

3,98

5,95

<https://jakbarkota.bps.go.id>

<https://jakbarkota.bps.go.id>

<https://jakbarkota.bps.go.id>
